

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato perdana Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis perspektif Teun van Dijk, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana “demokrasi khas Indonesia” dikonstruksikan sebagai narasi politik yang tidak hanya merepresentasikan nilai budaya bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai strategi legitimasi kekuasaan. Melalui dimensi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, pidato demokrasi khas Indonesia oleh Presiden Prabowo membangun definisi demokrasi yang menekankan harmoni, persatuan, kesantunan, dan penolakan terhadap konflik terbuka sebagai ciri utama demokrasi Indonesia. Dalam kerangka van Dijk, pidato Prabowo tidak hanya merefleksikan gagasan politik, tetapi juga berfungsi sebagai praktik diskursif yang membentuk pengetahuan sosial masyarakat mengenai demokrasi yang “ideal” bagi Indonesia. Oleh karena itu, tesis ini menyimpulkan bahwa Prabowo lebih tepat dipahami sebagai figur politik yang berada dalam posisi transisional dan ambivalen antara kecenderungan demokratik-populis dan berpotensi mengarah pada delegatif-otoritarian seperti dijelaskan Guillermo O'Donnell. Konsep delegatif-otoritarian berkaitan dengan Demokrasi Delegatif (Delegative Democracy) yang dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan perilaku otoriter (potensi delegatif-otoritarian)

Secara keseluruhan, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa konstruksi wacana demokrasi khas Indonesia dalam pidato Prabowo dibangun secara sistematis melalui strategi bahasa, menunjukkan dominasi simbolik presiden sebagai penafsir utama demokrasi nasional, serta mereproduksi ideologi kekuasaan yang menekankan harmoni sosial sebagai fondasi legitimasi politik. Oleh karena itu, demokrasi khas Indonesia sebagaimana direpresentasikan dalam pidato tersebut perlu dipahami secara kritis sebagai wacana yang dapat

memperkaya model demokrasi kontekstual, tetapi sekaligus berpotensi membatasi ruang kritik jika dipraktikkan secara eksklusif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan peneliti. Pertama, bagi pengembangan kajian akademik, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperluas studi Analisis Wacana Kritis dalam konteks komunikasi politik Indonesia, khususnya terhadap pidato-pidato elite negara sebagai praktik diskursif yang memproduksi ideologi dan legitimasi kekuasaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji wacana politik tidak hanya pada level teks, tetapi juga pada praktik kebijakan dan implementasi pemerintahan, sehingga dapat melihat konsistensi antara narasi simbolik dan tindakan politik nyata.

Kedua, bagi praktisi politik dan pembuat kebijakan, konsep demokrasi khas Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada retorika normatif tentang harmoni dan kesantunan, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan yang menjamin partisipasi publik, perlindungan kebebasan berekspresi, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga ruang bagi kritik, oposisi, dan perbedaan pendapat sebagai bagian inheren dari kehidupan politik.

Ketiga, bagi masyarakat sipil dan media, diperlukan sikap kritis dalam membaca wacana politik negara. Narasi persatuan, stabilitas, dan demokrasi santun harus dipahami bukan sekadar sebagai pesan moral, tetapi juga sebagai konstruksi makna yang dapat memengaruhi batas-batas diskursus publik. Oleh sebab itu, media dan masyarakat perlu menjaga ruang deliberasi yang terbuka agar demokrasi tidak direduksi menjadi sekadar simbol budaya, melainkan tetap menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Keempat, bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap pidato kenegaraan presiden-presiden Indonesia lainnya guna memetakan evolusi wacana demokrasi dalam konteks sejarah politik nasional. Kajian semacam ini akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana konsep

demokrasi di Indonesia terus dinegosiasikan, dipertahankan, atau diubah sesuai dengan konfigurasi kekuasaan pada setiap periode pemerintahan.